Hadapi Musim Hujan Ektrim, Pemkab Pasuruan Intens Komunikasi Dengan Pempus dan Pemprov Jatim

Jumat, 13 Maret 2020

Pemerintah Kabupaten Pasuruan secara aktif berkomunikasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait normalisasi sejumlah Daerah Aliran Sungai (DAS). Hal ini dilakukan untuk mengurangi risiko bencana di wilayah Kabupaten Pasuruan, yang rawan banjir dan tanah longsor selama musim hujan. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Pasuruan, Anang Saiful Wijaya, menekankan pentingnya koordinasi ini, mengingat tidak semua DAS berada di bawah wewenang Kabupaten Pasuruan. Pemkab Pasuruan telah mengirimkan surat kepada Menteri PUPR dan Pemprov Jatim untuk segera merealisasikan normalisasi DAS tersebut.

Selain komunikasi, Pemkab Pasuruan juga mengoptimalkan program "Adus Kali" yang melibatkan warga dalam penelusuran sungai dari hulu hingga hilir. Program ini bertujuan untuk memahami masalah yang dihadapi sungai dan mencari solusi. Pemkab Pasuruan telah menyiapkan dua eskavator untuk penanganan banjir.

Pemkab Pasuruan juga fokus pada program Desa Tangguh Bencana, yang bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Terdapat 11 desa yang telah mengikuti program ini, dengan fokus pada edukasi masyarakat agar mandiri, mengantisipasi, dan siap mengevakuasi diri saat terjadi bencana.

Sebelumnya, Plt. Kepala BPBD Kabupaten Pasuruan, Tectona Jati, mengungkapkan bahwa lima DAS di wilayah Kabupaten Pasuruan berpotensi menyebabkan banjir. Dua DAS, yaitu sungai Wrati dan Kedunglarangan, berada di bawah wewenang Pemerintah Pusat, sedangkan tiga DAS lainnya, yaitu sungai Welang, Rejoso, dan Petung, berada di bawah wewenang Pemerintah Provinsi.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.